



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM.0501-Sj/556
Sifat : **Mendesak**
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perpanjangan Penutupan Perkantoran Kementerian PUPR
Pada PPKM Darurat Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di
Luar Jawa-Bali s.d. tanggal 25 Juli 2021

Jakarta, 20 Juli 2021

Yth. **Para Pejabat dan Pegawai**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di -

T E M P A T

Sehubungan dengan pernyataan resmi Bapak Presiden RI terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 pada Selasa, 20 Juli 2021 malam, dan menindaklanjuti surat-surat kami sebelumnya terkait pengaturan kegiatan perkantoran dan pelaksanaan pekerjaan selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penutupan seluruh perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada di **Pulau Jawa dan Pulau Bali serta 15 (lima belas) Kabupaten/Kota** yang ditetapkan pada kondisi **darurat** sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 pada diktum KESATU huruf c)1 sebagaimana tabel terlampir **diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021**.
2. Selain di wilayah sebagaimana poin 1 di atas, bagi perkantoran Kementerian PUPR yang kondisi pegawainya banyak terpapar COVID-19 dapat menerapkan *Work from Office* (WFO), *Work from Home* (WFH), atau penutupan sementara (*partial lockdown*) yang diatur oleh masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan.
3. Penyelenggaraan perkantoran selama dilakukan penutupan dan/atau berada pada kondisi darurat berpedoman pada ketentuan surat Sekretaris Jenderal nomor UM.0501-Sj/520 tanggal 2 Juli 2021.
4. Dihimbau kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja untuk mendorong penerapan pemakaian 2 (dua) masker. Pengadaan masker luar/kain dilakukan melalui pengumpulan bantuan dari para pegawai dengan memberdayakan koperasi, usaha kecil, mikro, dan menengah setempat.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lampiran

Nomor : UM.0501-Sj/556

Tanggal : 20 Juli 2021

**DAFTAR WILAYAH YANG DITETAPKAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
KRITERIA LEVEL 4 (EMPAT) PADA KONDISI DARURAT
SESUAI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2021**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Status PPKM
Sumatera Utara	1. Kota Medan	Darurat
Sumatera Barat	2. Kota Bukittinggi	Darurat
	3. Kota Padang	Darurat
	4. Kota Padang Panjang	Darurat
Kepulauan Riau	5. Kota Batam	Darurat
	6. Kota Tanjung Pinang	Darurat
Lampung	7. Kota Bandar Lampung	Darurat
Nusa Tenggara Barat	8. Kota Mataram	Darurat
Kalimantan Barat	9. Kota Pontianak	Darurat
	10. Kota Singkawang	Darurat
Kalimantan Timur	11. Kabupaten Berau	Darurat
	12. Kota Balikpapan	Darurat
	13. Kota Bontang	Darurat
Papua Barat	14. Kabupaten Manokwari	Darurat
	15. Kota Sorong	Darurat